

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep produksi ruang Henri Lefebvre dapat diimplementasikan secara efektif untuk memahami dinamika perebutan ruang di kawasan wisata Pantai Purus Padang. Berdasarkan analisis tiga elemen produksi ruang Lefebvre, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi, penelitian ini mengungkap bahwa Pantai Purus tidak hanya menjadi area wisata namun juga menjadi arena interaksi sosial-ekonomi yang kompleks. Praktik spasial terlihat dari aktivitas masyarakat lokal, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan nelayan, yang memanfaatkan ruang ini untuk kehidupan ekonomi mereka. Representasi ruang dikendalikan oleh pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata, namun sering kali menimbulkan benturan dengan kepentingan masyarakat lokal.

Lebih jauh, ruang representasi di Pantai Purus menunjukkan bagaimana masyarakat lokal, PKL, dan pengunjung memberikan makna berbeda terhadap ruang ini; bagi masyarakat, pantai bukan sekadar tempat wisata tetapi juga identitas dan sumber penghidupan. Konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal, terutama PKL, mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara fungsi wisata yang dirancang pemerintah dan persepsi ruang dari komunitas lokal yang menggantungkan hidup mereka di kawasan ini. Melalui analisis ini, penelitian ini memberikan wawasan bahwa perebutan ruang tidak hanya terkait dengan aspek

fisik, tetapi juga menyentuh aspek identitas sosial dan ekonomi masyarakat yang melibatkan kekuatan politik, ekonomi, serta resistensi kultural. Pandangan Lefebvre tentang politik ruang menjadi relevan dalam menjelaskan bahwa produksi ruang di Pantai Purus Padang merupakan proses yang dinamis dan multidimensional, menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang ada.

Penelitian ini memperjelas bahwa perebutan ruang di Pantai Purus Padang mencerminkan ketegangan yang kompleks antara pemerintah, masyarakat lokal, dan kepentingan pariwisata. Pemerintah Kota Padang menetapkan Pantai Purus sebagai area prioritas untuk pengembangan pariwisata dengan regulasi yang ketat, termasuk larangan berjualan bagi PKL di area publik. Namun, bagi masyarakat lokal, pantai ini bukan hanya sebuah aset ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya dan sejarah mereka. Bagi PKL, ruang ini menyediakan kehidupan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga larangan dan upaya relokasi sering kali direspon dengan penolakan atau perlawanan, seperti terlihat dari resistensi mereka terhadap kebijakan penertiban pemerintah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa produksi ruang di Pantai Purus adalah proses negosiasi yang berkelanjutan di mana berbagai aktor pemerintah, masyarakat lokal, wisatawan, dan PKL secara terus-menerus memperjuangkan interpretasi dan penggunaan ruang yang berbeda. Kesenjangan antara regulasi formal dan realitas di lapangan menghasilkan dinamika sosial yang unik, di mana praktik spasial masyarakat terus berjalan dan berkembang seiring waktu meskipun sering kali bertentangan dengan peraturan. Hal ini mencerminkan bahwa, menurut

Lefebvre, ruang publik bukanlah entitas statis, tetapi hasil dari proses interaksi sosial yang dinamis.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini berargumen bahwa upaya untuk mewujudkan kawasan wisata yang tertata dan harmonis di Pantai Purus Padang memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan pariwisata tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah perlu membangun dialog yang konstruktif dengan komunitas lokal serta PKL untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Implementasi dari konsep produksi ruang Lefebvre mengingatkan bahwa pembangunan ruang yang berkelanjutan harus memperhitungkan kompleksitas sosial yang ada, sehingga menciptakan ruang yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang hidup yang inklusif bagi komunitas yang ada di dalamnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan produksi ruang di Pantai Purus Padang tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial, politik dan budaya yang kuat. Dengan memahami bagaimana politik ruang terbentuk dan berlangsung di kawasan wisata ini, dapat dilihat kompleksitas interaksi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan kepentingan wisata yang saling berkompetisi. Sebagai kontribusi akademis, penelitian ini memperkaya wacana tentang bagaimana konflik ruang dalam kawasan wisata mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang

perkotaan. Peneliti menyarankan agar pendekatan inklusif dan sosialisasi dari pemerintah ditingkatkan dalam permasalahan ruang di Pantai Purus Padang. Serta secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan kajian ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam menganalisis fenomena perebutan ruang di kawasan wisata lainnya di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ruang publik yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

2. Secara Praktis

Terdapat beberapa saran praktis yang bisa dikemukakan. Pertama, pendekatan akomodatif dan partisipatif perlu diperkuat dalam pengambilan keputusan tata kelola ruang di kawasan ini. Pemerintah Kota Padang, sebagai pemangku kepentingan utama, harus melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, terutama yang terkait dengan penataan PKL dan pemanfaatan ruang publik. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Kedua, perlunya kebijakan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan konsisten. Pemerintah sebaiknya memastikan keberlanjutan dari rencana yang telah disusun, seperti yang tercantum dalam RTRW Kota Padang. Pembuatan regulasi yang jelas, seperti pembatasan wilayah perdagangan dan pengaturan jam operasional bagi PKL, dapat

meminimalisasi ketidaknyamanan wisatawan sekaligus tetap mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Ketiga, pentingnya penyediaan alternatif lokasi berjualan bagi PKL yang strategis dan sesuai dengan karakteristik kegiatan wisata Pantai Purus. Penataan ulang lokasi berdagang bagi PKL yang sesuai dengan arus wisata dapat meningkatkan ketertiban tanpa mengurangi peluang ekonomi mereka. Ini dapat mengurangi gesekan antar PKL dan menciptakan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengunjung.

